

Pola Kehidupan Masyarakat Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong (Studi Pada Kehidupan Sosial Masyarakat Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Kampung Baru)

Fx. Nurcahyo Andar Rusito¹, Hermanto Suaib², Nur Hidayah³
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kehidupan sosial masyarakat pedagang kaki lima; untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong para pedatang bekerja sebagai PKL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan Teknik pengumpulan data yaitu observasi; interview atau wawancara; dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan pada awal bulan juni tahun 2013. Populasi pada penelitian ini adalah semua pedagang kaki lima di kelurahan kampung tembok berlin, adapun sampel berjumlah 143 pedagang dan dipilih menggunakan *Isimpe Random Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang berada di usia produktif 30-40 tahun; berpendidikan rendah SD-SMA; Sarana dagang yang digunakan adalah gerobak; sebagian besar PKL cenderung berkelompok dengan sejenisnya; menempati ruang publik seperti trotoar, badan jalan serta lahan parkir; lokasi berjualan dekat dengan tempat tinggalnya; sebagian besar PKL belum memiliki izin usaha dari pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendatang memilih menjadi PKL ialah Tidak memerlukan pendidikan atau keterampilan; tidak memerlukan modal yang besar; dan untuk menambah penghasilan keluarga. Bersarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dorongan untuk menjadi pedagang kaki lima karena adanya persaingan yang ketat disektor pekerjaan yang bersifat formal; kemampuan dan keterampilan yang terbatas; waktu bekerja disektor informal lebih luwes sehingga para PKL bias mencari pekerjaan lainnya selain menjadi PKL.

Kata Kunci : Pola Kehidupan; Pedagang Kaki Lima; Kota Sorong

PENDAHULUAN

Daerah perkotaan merupakan wadah konsentrasi permukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan penduduk kota di negara sedang berkembang tidak saja mencerminkan pertumbuhan alami penduduk kota tetapi juga pertumbuhan.

Arus penduduk dari desa ke kota yang cukup besar. Perpindahan arus penduduk dari desa ke perkotaan yang sedang berjalan di negara sedang berkembang sekarang ini sudah terjadi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk kota disebabkan oleh arus gerakan dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang lazim kita kenal dengan istilah urbanisasi. Pada umumnya konsep urbanisasi diartikan sebagai proses yang membawa bagian yang semakin besar penduduk suatu negara berdiam di pusat perkotaan. Mimpinya untuk mengubah nasib dan mendapatkan kehidupan yang layak membuat arus urbanisasi di kota kian meningkat. Setiap tahun urbanisasi dan berbagai bentuk perpindahan bentuk lainnya yang masuk ke kota Sorong semakin sulit terbelenggu. Bagi yang datang dan bekerja, ini akhirnya menjadi beban berat bagi pemerintah kota. Tak hanya masalah sosial seperti gelandangan dan sejenisnya, urbanisasi juga berdampak pada masalah kependudukan lainnya. Di satu sisi kegiatan ekonomi dan sosial penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan yang tinggi semakin memerlukan ruang untuk meningkatkan kegiatan penduduk sehingga menyebabkan semakin bertambahnya ruang untuk mendukung kegiatan sektor informal.

Menurut Jayadinata (1999:146), Karakteristik sektor informal yaitu bentuknya tidak terorganisir, kebanyakan usaha sendiri, cara kerja tidak teratur, biaya dari diri sendiri atau sumber tak resmi, dapatlah diketahui betapa banyaknya jumlah anggota masyarakat memilih tipe usaha ini, karena mudah dijadikan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat strata ekonomi rendah yang banyak terdapat di negara kita terutama pada kota besar maupun kecil.

Beberapa ahli beranggapan bahwa sektor formalpun membutuhkan keberadaan sektor informal, sehingga tepat sekali bila dikatakan bahwa sektor formal dan informal dianggap berkaitan dan saling melengkapi dalam kegiatan perekonomian perkotaan. Salah satu bentuk perdagangan sektor informal yang begitu penting adalah pedagang kaki lima. Bahkan begitu penting dan has dalam sektor informal, istilah informal sering diidentifikasi dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Di lain pihak kegiatan pedagang kaki lima tersebut ternyata memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam golongan ekonomi lemah. Selain itu, kegiatan sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Mempertimbangkan keadaan dan potensi tersebut,

selayaknya pola penanganan dan pembinaan kegiatan pedagang kaki lima harus didasarkan pada konsep perilaku dan karakteristik berwawasan lingkungan agar isi pengaturannya tepat.

Selain itu sebagian besar pedagang kaki lima dikawasan perkotaan dan sekitarnya adalah bukan penduduk asli (pendatang dari desa atau luar provinsi) dan bukan merupakan pilihan pertama sebagai mata pencahariannya. Dengan adanya proses urbanisasi dan migrasi dengan mengacu kepada permasalahan tersebut akan timbul masalah demografi

Dan sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal. Kegiatan ekonomi sektor informal salah satunya pedagang kaki lima. Bisa dilihat hampir semua kota-kota besar di Indonesia berkembang sangat pesat. Terlebih selama krisis moneter menyebabkan banyak industri gulun tikar, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini pada gilirannya menambah pengangguran baru, yang nantinya muncul fenomena-fenomena baru pedagang kaki lima sebagai jalan keluar dari pengangguran.

Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya

Masalah pedagang kaki lima bagi sebagian orang dan pemerintahan adalah sebuah masalah bagi kota Sorong, menurut mereka. Pedagang kaki Lima merupakan suatu kelengkapan kota – kota di seluruh dunia dari dahulu. Sebagai kelengkapan, pedagang kaki lima tidak mungkin dihindari atau ditiadakan. Yang harus dilakukan dalam menyikapi keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut adalah melalui penataan, pembinaan, dan pengawasan. Pedagang Kaki Lima memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan budaya yang membentuk suatu kawasan perkotaan. Pada intinya adalah Pedagang Kaki Lima merupakan sekelompok orang yang melakukan kegiatan perdagangan di pinggir jalan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima berlokasi di sekitar atau dekat dengan kawasan fungsional, yang merupakan pusat kegiatan manusia.

Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada. Faktor utama adalah sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan ataupun sarana yang dipergunakan semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat didalamnya. Salah satu sektor yang kini menjadi perhatian pemerintah Kota Sorong adalah sektor tenaga kerja yang sifatnya informal. Sektor kerja informal ini beroperasi pada tempat-tempat tertentu di setiap pusat keramaian kota Sorong. Ada beberapa komunitas pedagang kaki lima yang ada di kota Sorong, salah

satunya adalah komunitas pedagang kaki lima di Tembok Berlin. Sesuai dengan namanya komunitas ini beraktifitas di sepanjang kawasan Tembok Berlin, tepatnya di kelurahan Kampung Baru, RT. 03 / RW.06.

Komunitas pedagang kaki lima ini sudah berjualan di kawasan Tembok Berlin sejak beberapa puluh tahun yang lalu dan jumlah mereka terus bertambah setiap tahunnya, Jenis dagangannya bermacam-macam. Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima cukup membantu mengatasi masalah pengangguran di kota Sorong dan sebagai salah satu sumber pemasukan PAD bagi pemerintah kota Sorong, tetapi di sisi lain keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan. Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai konsumennya dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Situasi tempat dan keramaian dapat dimanfaatkan untuk mencari rejeki halal sebagai pedagang kaki lima, misalnya makanan dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dapat dipakai sebagai salah satu modal untuk mencari ataupun menambah penghasilan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sektor informal pedagang kaki lima mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim. Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai profit misalkan pusat kota, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan hal-hal yang lain. Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini. Campur tangan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi pola kehidupan pedagang kaki lima.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran terperinci tentang motivasi dan keadaan kehidupan masyarakat pedagang kaki lima khususnya penjual makanan yang berada di Tembok Berlin.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini yaitu pada awal bulan Juni 2013. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Kampung Baru

Populasi dan Sampel

Populasi dalam hal ini adalah semua pedagang kaki lima yang berada di Kelurahan kampung baru, khususnya bagi para penjual makanan. Jumlah populasi penjual makanan yang berada di Tembok Berli berjumlah 143 pedagang jumlah populasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling* yaitu populasi tidak di pilih-pilih namun di tentukan secara acak atau di stratakan terlebih dahulu semua warga tersebut agar menghilangkan penilaian subjektif orang lain, dan jumlah responden yang dijadikan sampel adalah berjumlah 10 orang yang diharapkan dapat mewakili populasi. di antaranya Kepala Dinas Koprasi dan Usaha menengah Kecil; Kepala Lurah Kampung baru; Sekretaris Kelurahan Kampung Baru; Ketua RT setempat; Pedagang kaki lima sebanyak 4 orang; Masyarakat sekitar sebanyak 2 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan dan secara langsung mengadakan penelitian terhadap sasaran dan objek masalah untuk mengetahui objektifitas dari kenyataan yang ada dengan berdasarkan pada perencanaan yang sistematis. Serta dalam memperoleh gambaran selengkap mungkin, peneliti mengadakan *pralanged engagement*, artinya peneliti sesering mungkin melakukan interaksi terutama terhadap hal-hal menjadi kajian penelitian ini. Didalam mencapai sasaran sebagai mana di maksud, maka observasi diperlukan secara persisten, observation yakni observasi secara terus menerus guna menetapkan aspek penting dan kurang penting dengan mengacu pada dimensi yang dikaji, melalui kecermatan pengamatan, dimaksudkan untuk dapat melihat gejala dalam realitas kehidupan aktivitas sehari-hari.

Interview atau wawancara

Adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung yang di kerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Serta jenis wawancara ini tidak di laksanakan dengan struktur yang ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam, terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan informan terhadap kehidupan masyarakat pedagang kaki lima. Tekni wawancara ini di lakukan dengan semua informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari

informan. Banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum dan pada saat pengumpulan data, seperti mencari *key informan* yang dijadikan sumber informasi tentang mereka yang diteliti, menjalin hubungan baik dengan mereka dan mengadakan pendekatan, serta menciptakan suasana yang “enak” sebelum memulai suatu wawancara (hendrarso, 1999: 208) dengan demikian peneliti telah melakukan pendekatan-pendekatan secara tidak langsung dan lebih meluas. Adapun responden yang menjadi informan kunci yakni yang menjadi sampel penelitian penulis.

Adapun dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan alat perekam (tape recorder). Melakukan wawancara peneliti menggunakan alat perekam (*tape recorder*) untuk memperoleh hasil wawancara yang maksimal. Peneliti juga menggunakan dokumentasi (*camera digital*) untuk pengambilan gambar pada saat penelitian yang dijadikan sebagai bukti selama peneliti melakukan penelitian, selain itu peneliti juga menggunakan alat tulis berupa pena (*ballpoint*) dan buku catatan (*note book*) pena dan buku catatan yang digunakan ini untuk mengantisipasi informasi-informasi penting lainnya yang tidak terekam oleh recorder, sehingga dapat dicatat langsung oleh peneliti.

Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen yang ada. Dalam hal ini informasi berasal dari berbagai arsip maupun dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu mengenai jumlah pedagang lima

Jenis Data

Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah di persiapkan terlebih dahulu. Data Sekunder, yaitu data yang sudah terdokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang ingin di teliti yang berasal dari lembaga atau institusi terkait

Pendekatan

Pendekatan yang di pakai yakni, Pendekatan Normatif, yakni pendekatan yang di dasarkan atas peraturan yang berlaku. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan tentang interelasi dari sesama pedagang masyarakat serta bentuk interaksi yang terjadi antar pedagan dengan masarakat sekitarnya.

HASIL PENELITIAN

Pola kehidupan sosial masyarakat pedagang kaki lima di kelurahan Kampung Baru.

Temuan Studi Karakteristik Umum PKL :

Mayoritas pedagang kaki lima adalah kelompok usia 31 – 40 tahun yang merupakan usia produktif dalam memperoleh kesempatan kerja; Sebagian besar berpendidikan rendah setingkat SD-SMA. Banyaknya pedagang yang berpendidikan rendah menyebabkan terjadinya banyak penyimpangan dalam memahami peraturan pemerintah; Kegiatan PKL merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi warga kota Sorong; Kegiatan PKL dapat memberikan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran; Jumlah PKL meningkat selama sepuluh tahun terakhir, yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang membawa dampak pada meningkatnya pengangguran karena PHK dan meningkatnya migrasi; Pedagang kaki lima hanya memerlukan modal yang relatif kecil; Penghasilan PKL mampu melebihi penghasilan aktivitas formal. Selain itu lokasi juga berpengaruh pada pendapatan PKL.

Karakteristik Aktivitas PKL

Dari lokasi penelitian, jenis dagangan yang berupa makanan banyak dipilih oleh pedagang kaki lima; Sarana dagang yang paling banyak dipergunakan oleh PKL di lokasi penelitian adalah gerobak. Jenis dagangan dan sarana dagang mempunyai hubungan yang cukup signifikan; Berdasarkan pola penyebarannya, PKL pada lokasi berbeda-beda. Dari pola pengelompokan jenis dagangan, sebagian besar PKL saat ini cenderung berkelompok dengan sejenisnya; Pedagang kaki lima merupakan pekerja keras dengan jam kerja per hari jauh di atas jam kerja normal.

Karakteristik lokasi PKL:

PKL menempati ruang publik yang tersedia misalnya trotoar, badan jalan serta lahan parkir; Sarana dagang dan luas tempat yang dipergunakan mempunyai hubungan yang cukup signifikan dan erat; Jarak lokasi usaha dengan tempat tinggal PKL cenderung dekat; Sebagian besar PKL yang ada pada lokasi penelitian belum memiliki izintertulis dari pemerintah.

Persepsi Masyarakat Terhadap PKL dan Lokasinya:

Alasan masyarakat berbelanja pada PKL adalah sebagian besar karena harga yang murah.; Aktivitas PKL memiliki manfaat yang bervariasi bagi konsumennya. Namun intinya adalah adanya kemudahan yang diberikan oleh aktivitas PKL karena keberadaan mereka yang cenderung dekat dengan aktivitas masyarakat; Dampak negatif PKL menurut masyarakat lingkungan kotor, trotoar sempit, jalanan sesak dan kurang aman; Sebagian besar masyarakat lebih menyukai PKL yang bercampur dengan jenis lain karena akan memudahkan konsumen

untuk melihat-lihat sebelum membeli; Sebagian besar masyarakat menyatakan perlu diadakan pengaturan PKL; Hal yang perlu diatur meliputi sarana dagang, tempat usaha, waktu usaha dan jenis dagangan; Fasilitas umum yang ada pada lokasi perlu ditambah antara lain: Listrik, Air bersih, Tempat sampah, Parkir dan toilet; Lokasi PKL pada saat ini adalah sesuai karena dekat keramaian, transportasi mudah dan telah ditetapkan pemerintah.

Hubungan antara preferensi PKL dan persepsi masyarakat

lapangan hoki kota Sorong merupakan lokasi dengan tingkat kunjungan tinggi karena merupakan pusat kota sehingga baik PKL maupun masyarakat menyatakan lokasi ini sesuai untuk lokasi PKL. dan kenyataannya pedagang dapat berdagang dengan izin lisan dari petugas pemerintah Dengan pengaturan yang tepat pada sarana dagang, waktu dan tempat usaha, maka lokasi ini akan terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu keindahan dan ketertiban kota. Sebagai lokasi PKL fasilitas yang perlu ditambah adalah air bersih, listrik, dan tempat parkir; Ruas Jalan depan lapangan hoki sepanjang tembok merupakan lokasi yang sesuai untuk PKL. Walaupun ada beberapa orang yang merasa keberatan dengan adanya pedagang, terutama masyarakat yang halaman depan rumahnya ditempati oleh pedagang. Perlu adanya pengaturan agar lebih rapi dan tertib terutama pada sarana dagang serta tempat usaha. Fasilitas umum seperti air bersih, listrik, toilet dan tempat parkir perlu dibuat untuk dapat memenuhi aktivitas PKL.

Pandangan pemerintah terhadap PKL di Kelurahan kampung Baru

Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini. Campur tangan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi pola kehidupan pedagang kaki lima

Hal ini dapat di lihat juga dari hasil wawancara dengan bapak lurah Kampung Baru yang mengatakan

“Pelaku bisnis dan di kualifikasi pada usaha pedagang kecil di kampung baru ini untuk berdirinya kaki lima ini sangat banyak namun merupakan intgar dengan kondisi tersebut. Konflik diantara pedagang pasti ada, melakukan domisili usaha sekitar persen hanya 20% yang menetap. Yang tinggal disini tidak mempunyai rumah sendiri mereka kontrak rumah. Mereka usaha dan berusaha tidak memikirkan hal yang lain mereka melakukan usaha, mendengarkan saran dari pemerintah namun ada yang ditanggapi dengan baik maupun tindak yang malas tau mereka juga berinteraksi

dengan masyarakat dengan baik. Mereka tidak melakukan sifat yang berkonflik, mereka dari jauh datang kesini hanya untuk mencari nafkah. Dan mereka juga sebagai salah satu sumber dalam peningkatan pendapatan daerah

Adapun tugas kami yakni Lurah melakukan tugas, baik letak atau data-data mereka pun ada di kantor lurah. Setiap tahun 4 kali mengundang mereka, untuk berhati-hati ada banyak hal yang mereka curahkan atau sampaikan, terorganisir sangat baik. Untuk PKL harus lapor kelurah mereka tidak boleh mendirikan usaha tanpa melapor lurah setempat” (Bapak Alber Lemauk, SE)

Berdasarkan dari hasil wawancara dan Pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa : Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan kelurahan Kampung baru, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para PKL menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan. Sesuai dengan keterangan dengan tajuk Pemkot terus lakukan Penataan PKL. Pemerintah Kota Sorong terus melakukan penataan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), hal ini dikarenakan keberadaannya peraturan serta tidak pada tempatnya. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Sorong sendiri yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003, mengeluarkan Perda tentang Pedagang Kaki Lima. Perda ini dibuat untuk mengatur dan memberikan pembinaan PKL, agar PKL tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan Kota Sorong.

Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas pemerintah namun Dengan mengatasnamakan kemanusiaan, praktek kaki lima ini selalu menyembunyikan penyimpangannya. Dengan begitu maka akan sangat sulit untuk menertibkannya. Dengan cara itu pula masyarakat telah terpolo dalam sebuah pola perilaku dari pedagang kaki lima. Kebiasaan ini menjadi wajar-wajar saja karena perilaku konsumsi yang telah membudaya. Celaknya lagi pemerintah kurang tanggap dengan keadaan ini, malah terjadi semacam pembiaran. Dengan begitu praktek ini diterima belaka sebagai kewajiban sosial. Dengan menakar kadar yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat, maka menurut hemat saya pola semacam ini harus segera dipotong. Salah satunya adalah menerapkan desain yang tepat untuk mengakomodir permasalahan seperti ini. Bukan hanya menekan pada pedagangnya, namun menciptakan kesatuan sistem penopangnya dan itu ada pada semua pihak. Artinya setiap elemen bersinggungan, sudah seharusnya bisa saling memahami dan menjaganya.

Selain itu cara pandang konsumsi membeli dagangan di pinggir jalan, juga harus dirubah. Menaruhkan semua beban kepada pemerintah hanyalah keniscayaan nisbi, oleh karena itu dengan memahami dan mengerti maka semua pihak haruslah ambil bagian.

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendatang untuk memilih menjadi pedagang kaki lima

Salah satu tantangan pembangunan di Indonesia saat ini adalah mengatasi masalah pengangguran dan kesempatan kerja. Sulitnya mengatasi masalah tersebut karena jumlah pencari kerja relatif banyak, sementara mutu pendidikan dan keterampilannya rendah atau tidak sesuai dengan permintaan lapangan kerja karena persaingan dalam arena pasar kerja yang melibatkan pencari kerja dengan kemampuan memadai yang dibutuhkan oleh sektor formal sangat tinggi. Bertolak dari keadaan inilah, sektor informal menjadi kantong penyangga bagi para pencari kerja yang kurang kompetitif tersebut sehingga aktifitas pada sektor ini termanifestasi dalam banyak bentuk usaha seperti perdagangan, industri kecil, macam-macam jasa dan sebagainya. Pada dasarnya Setiap warga dalam masyarakat mempunyai kesempatan dan memiliki keinginan untuk mencapai status dan penghasilan yang lebih tinggi. Keinginan untuk mengubah nasib, dari nasib yang kurang baik menjadi nasib yang lebih baik merupakan impian setiap orang. Dalam sosiologi, proses keberhasilan seseorang mencapai jenjang sosial yang lebih tinggi atau kegagalan seseorang sehingga jatuh di kelas sosial yang lebih rendah dinamakan mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah bentuk perpindahan status dan peranan seseorang atau kelompok orang dari kelas sosial yang lebih rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Menurut Hurton dan Hunt (1987), mengartikan mobilitas sosial sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Sementara menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Sehingga untuk menaikkan kelas sosial, masyarakat melakukan migrasi atau perpindahan penduduk. Pada umumnya migrasi atau perpindahan penduduk erat kaitannya dengan faktor-faktor berikut ini:

Faktor Pendorong (*Push Factors*)

Faktor ini merupakan adanya dorongan dari daerah asal untuk melakukan perpindahan penduduk. Faktor tersebut antara lain karena kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal, penambahan penduduk yang menyebabkan pengangguran nyata atau tersembunyi dan juga kurangnya penghasilan yang di peroleh, serta kondisi geografis daerah asal.

Faktor Penarik (*Full Factors*)

Faktor ini adalah karena adanya daya tarik yang menyebabkan seseorang melakukan perpindahan penduduk. Faktor tersebut antara lain karena daya tarik ekonomi kota, banyak fasilitas kehidupan yang lebih memadai. Adanya faktor-faktor penarik ataupun pendorong di atas merupakan perkembangan dari ketujuh teori migrasi (*The Law of Migration*) yang dikembangkan oleh E.G Ravenstein pada tahun 1885 (Munir, 2000:122).

Salah satu aspek untuk mengetahui latar belakang kehidupan sosial pedagang kaki lima adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang mendorong untuk terjun ke sektor informal sebagai pedagang kaki lima. Sedangkan yang kita ketahui bahwa pekerjaan di sektor informal merupakan pekerjaan yang tidak menentu. Tapi kenyataannya yang kita lihat pedagang kaki lima di depan lapangan hoki tiap tahunnya makin bertambah. Untuk mengetahui faktor pendorong responden menjadi pedagang kaki lima dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13
Distribusi Responden Berdasarkan Faktor
Untuk Menjadi Pedagang kaki lima di depan lapangan Hoki

No	Faktor Pendorong	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak memerlukan pendidikan atau keterampilan	15	50
2	Tidak memerlukan modal yang besar	10	33,3
3	Untuk menambah penghasilan keluarga	5	16,7
	Jumlah	30	100

Dari hasil di atas menunjukkan bahwa faktor pendorong responden menjadi PKL yaitu tidak memerlukan pendidikan atau keterampilan sebanyak 15 responden (50%), sedangkan responden yang menyatakan bahwa faktor pendorong sebagai PKL karena tidak memerlukan modal yang besar sebanyak 10 responden (33,3%), dan untuk menambah penghasilan keluarga sebanyak 5 responden (16,7%).

Seiring dengan itu, tentunya ada faktor yang mendorong responden untuk melakukan migrasi ke kota Sorong yakni Kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai di daerah asal; Makin padatnya masyarakat di kota asal, sehingga meningkatnya persaingan; Kurangnya penghasilan yang diperoleh dari bekerja di daerah; Mencari pengalaman di kota ; Kondisi Geografis di daerah asal yang tidak mendukung;

Di atas menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan responden untuk pindah dan bekerja di kota Sorong, yaitu karena kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai di daerah asal dan kurangnya penghasilan yang diperoleh dari bekerja di daerah asal. Pada uraian di atas menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan sehingga responden pindah untuk mencari pekerjaan di kota Sorong adalah karena kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal, sehingga mereka berusaha mencari lapangan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selain itu juga faktor kurangnya penghasilan yang diperoleh dari bekerja di daerah asal.

Hasil wawancara penulis terhadap salah satu PKL di Kampung Baru yang mengatakan :

” saya berdagang di sini sudah sampe 6 tahun adapun bentuk dagang say seperti minuman & makanan, minuman ada berupa Qapucino, nescape & Jus. Makanannya seperti : Supermi, Pisang keju, pisang goreng. Adapun Pendapatannya tidak tetap tidak bisa diperkirakan, mereka juga masih untuk membayar tenda-tenda ini kalau malam. Namun bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan seperti ini, kadang juga mereka tidak dapat menghasilkan sama sekali. Peran pemerintah belum memeberikan bantuan terhadap pedagang ini. (ibu Murni)”

Faktor ekonomi bagi para responden sangat penting bagi kelangsungan hidup. Sehingga mereka memilih untuk pindah ke kota Sorong demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Dorongan untuk bekerja di kota bagi para pendatang tentunya sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Kesempatan kerja di kota untuk para migran dari desa umumnya mereka berada pada lapangan kerja sektor informal, karena tingkat kemampuan yang dimiliki oleh mereka sangat minim, di samping itu persaingan dalam lapangan kerja di sektor formal di kota cukup ketat sehingga mereka hanya bekerja pada jenis pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik semata. Ada dua alasan mengapa para migran memilih bekerja di sektor informal, pertama oleh karena waktu bekerja di sektor informal bersifat luwes sehingga mereka dapat mencari pekerjaan yang lainnya.

Adapun kajian Umum Tentang Hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL) walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL), namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima.

Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 11 UU nomor 39/199 mengenai Hak Asasi

Manusia : setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia (1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak; (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil observasi di lapangan dan analisis data serta temuan studi, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Faktor yang mendorong para pendatang dari asal sebagai pedagang kaki lima sebagai suatu pekerjaan, yaitu adanya dorongan untuk bekerja di kota dan ajakan untuk bekerja sebagai PKL. Peran sanak keluarga dan teman juga tidak lepas membantu mencarikan pekerjaan ketika para pendatang dari desa berada di kota. Latar belakang kehidupan sosial para PKL di Kelurahan kampung Baru. rata-rata berasal dari suku Makassar dan Jawa. Kebanyakan tingkat pendidikan yang dimiliki hanya sebatas SD dan SMP, sehingga mendorong mereka untuk terjun kesektor informal. Karena bekerja di sektor informal tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan yang tinggi; Keadaan sosial ekonomi PKL di Kelurahan kampung baru, cukup memadai. Sebagai pekerja di sektor informal, keadaan tempat tinggal mereka yang status kepemilikan rumah sendiri yang terbuat dari setengah batu. Kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan bagi kelangsungan hidup, hubungan yang baik antar walaupun persaingan tetap ada; Aktivitas PKL merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi warga kota Sorong yang tidak dapat memasuki sektor formal karena mempunyai ciri-ciri mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal; Lokasi PKL yang telah ditentukan oleh Pemda menyebabkan pola penyebaran yang berbeda-beda, sedangkan saat ini PKL cenderung mengelompok dengan sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan; Meskipun telah dibuat peraturan tentang penataan PKL namun baik PKL atau masyarakat menganggap perlu diadakan pengaturan yang lebih lanjut karena pada beberapa lokasi masih kelihatan semrawut dan kurang tertib. Sementara kegiatan PKL sebagai salah satu sektor informal belum terantisipasi dalam perencanaan tata ruang kota sehingga sarana dan prasarana yang ada biasanya kurang mendukung kegiatan PKL. Misalkan fasilitas dan utilitas umum seperti jaringan listrik, air bersih, toilet, sampah dan tempat parkir belum memenuhi kebutuhan kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bharantika, B, Elita, 1999, "Klasifikasi Sumber-Sumber PAD yang Potensial untuk Dikembangkan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upaya Peningkatannya di Kabupaten Dati II Jayapura, *Tesis S-2*, Pascasarjana-UGM, Yogyakarta.
- Davey, K.J, 1998 *Pembiayaan Pemerintah Daerah—Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta.
- Devas, N., Binder, B., Both, A., Davey, K., Kelly, R., 1998, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Haritz, Benyamin, 1995, "Peran Administrasi Pemerintah Daerah : Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Se-Jawa Barat", *Prisma*, Majalah Kajian Ekonomi dan Ilmu Sosial, No. 4, 81-95.
- Gitosudarmo, Indriyo, 1997, *Pengantar Bisnis*, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.
- Insukindro, Mardiasmo, Widayat, W., Jaya, W.K., Purwanto, B.M., Halim, A., Suprianto, J., Purnomo, A.B., 1994, *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*, Buku I, KKD FE UGM, Yogyakarta.
- Jaya, W.K., 1996, "Analisis Keuangan Daerah; Pendekatan Makro", *Model Program PMSES*, Kerjasama Ditjrn PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, UGM, Yogyakarta.